

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

sektor pariwisata merupakan penggerak ekonomi global yang sangat penting khususnya pada abad ke-21 yang telah diakui oleh beberapa organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Bank Dunia, dan *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) bahwa pariwisata merupakan bagian internal dipisahkan dari kehidupan manusia dalam kegiatan sosial dan ekonomi (Walton, 2023).

Pariwisata menjadi pengaruh bagi ekonomi suatu negara oleh berbagai faktor. Pertama, sektor pariwisata sebagai penghasil devisa atau sumber bagi mata uang asing untuk mendapatkan barang modal yang dipakai dalam produksi. Kedua, pengembangan pariwisata dapat menjadi stimulus pembangunan infrastruktur. Ketiga, pengembangan sektor pariwisata mendorong sektor-sektor ekonomi lainnya. Keempat, pariwisata dapat berkontribusi terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan. Kelima, pariwisata menyebabkan *positive economies of scale*.

Sejak didirikan pada 18 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand. ASEAN bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional serta membentuk kerjasama di banyak bidang untuk kepentingan bersama, perkembangan internasional mendorong ASEAN untuk menyelaraskan diri guna mencapai kemajuan signifikan di berbagai sektor baik politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Pengembangan ini menyebabkan negara anggota ASEAN

setuju pada pertemuan di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 untuk mengembangkan komunitas regional yang terintegrasi di masa mendatang pada tahun 2020.

Sesuai dengan perkembangan dan persiapan dari setiap negara anggota, KTT ASEAN di Bali pada 2003 menghasilkan Bali Concord II, dimana para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk komunitas ASEAN (ASEAN Community). Dan juga memutuskan untuk mempercepat proses terintegrasi kawasan ASEAN dari tahun 2020 menjadi 2015, setelah Deklarasi Cebu setelah ditandatangani di Filipina. Komunitas ekonomi ASEAN merupakan satu daripada tiga pilar yang mendukung integrasi ASEAN. Karena potensi pariwisata Asia Tenggara yang besar dan mampu bersaing dengan sektor lain di seluruh dunia, sektor pariwisata membantu integrasi ini. Hal ini terbukti adanya peningkatan jumlah pengunjung setiap tahunnya.

Dalam meningkatkan pariwisata ASEAN, menteri pariwisata ASEAN berupaya meningkatkan industri pariwisata berdasarkan prinsip bahwa integrasi regional harus didukung oleh kerjasama pariwisata. Mereka mempunyai pandangan yang sama bahwa upaya pertumbuhan pariwisata di setiap negara akan jauh lebih efektif jika dilakukan bersama dibawah satu organisasi. Kerjasama pariwisata ASEAN perlu dilakukan pemahaman bersama agar kawasan ASEAN dapat terintegrasi dan bebas hambatan, maka perlu adanya kerangka tersendiri yang kedepannya akan mencakup kepentingan masing-masing negara di bidang pariwisata. Namun, penting untuk diingat bahwa mereka harus bersaing untuk menyediakan pelayanan terbaik yang memenuhi standar dari ASEAN. Dalam hal

ini, ASEAN memiliki MRA dengan standar profesional dalam pengelolaan pariwisata.

ASEAN Tourism Forum (ATF) adalah mekanisme kerjasama dalam pariwisata ASEAN. ATF memiliki lima tujuan: pertama, untuk menjadikan ASEAN sebagai tujuan bagi pariwisata yang tunggal; kedua, menciptakan dan meningkatkan kesadaran akan ASEAN sebagai tujuan pariwisata yang unik di Asia Pasifik; ketiga, menarik lebih banyak turis ke masing-masing negara anggota ASEAN; keempat, mempromosikan perjalanan turis ke masing-masing negara anggota ASEAN; dan kelima, meningkatkan kerjasama antar sektor dalam sektor pariwisata ASEAN.

ASEAN menyadari bahwa pariwisata mempunyai peran penting sebagai penggerak ekonomi dan alat pembangunan dan perubahan untuk terintegrasi yang lebih baik dan lebih baik, diselenggarakan oleh *ASEAN Tourism Ministers Meeting* atau ATF di Phnom Penh, Kamboja, pada tahun 2011 menyepakati strategi khusus dalam bidang pariwisata. Sektor pariwisata yang selanjutnya akan dilaksanakan oleh setiap negara anggota khususnya *ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025*, ATSP ini mendorong peningkatan pariwisata di ASEAN sebagai acuan *National Tourism Organizations* (NTOs) dalam melaksanakan program pariwisata ASEAN. Yang biasanya diadakan setiap enam bulan sekali sebagai bagian dari kumpulan ATF. NTOs perlu memberikan kontribusi dan usaha untuk meningkatkan nilai pariwisata di Asia Tenggara untuk mengembangkan pariwisata ASEAN.

Rencana strategis yang dirancang ASEAN ini mengacu pada *Roadmap for Integration of Tourism Sector* (RITS) 2004 yang telah berakhir pada tahun 2010. Kerjasama di sektor pariwisata sangat menguntungkan bagi negara-negara Asia

Tenggara, karena dengan demikian upaya mempromosikan wisata setiap negara tidak lagi menjadi tanggung jawab masing-masing semata, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dan pariwisata telah masuk dalam 12 sektor prioritas liberalisasi untuk mencapai Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Sektor pariwisata adalah sektor jasa yang ada dalam prioritas liberalisasi dan menggambarkan terbukanya sektor jasa dan subsektor yang dapat menghilangkan hambatan masuk pasar dan menerapkan perlakuan nasional.

Hampir disetiap negara yang ada di kawasan Asia Tenggara telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu pendapatan ekonomi bagi negara dan masyarakat, karena berkembangnya pariwisata mendorong berbagai kegiatan produksi meningkatkan aktivitas pariwisata dapat membentuk perekonomian yang berkesinambungan serta menyerap tenaga kerja, memotong angka kemiskinan, meningkatkan pembangunan secara nasional, bermunculan produk wisata seperti jasa perhotelan, jasa transportasi, jasa perjalanan (*Travel*), maka dari itu sektor pariwisata perlu dikembangkan karena dapat menjadi pendorong pengembangan suatu wilayah atau daerah karena memanfaatkan sumber daya dan budaya yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung juga dapat menjadi transaksi investasi kerjasama asing dalam pengembangan pariwisata.

Namun pariwisata perlu dilakukan pengembangan yang lebih baik untuk masa yang akan datang atau disebut dengan *Sustainable Tourism*. Perlunya pengembangan pariwisata dalam berkelanjutan dikarenakan kondisi dari setiap negara memiliki perbedaan dalam memiliki sumber daya khususnya pada sumber daya alamnya. Selain itu pembangunan sistem pariwisata berkelanjutan ditujukan untuk mencegah adanya kerusakan alam maupun lingkungan di setiap negaranya

yang dapat berdampak bagi negara baik itu dari segi ekonomi, sosial bahkan pariwisata karena bisa menjadi dampak negatif yang akan mengurangi kunjungan wisatawan mancanegara untuk datang berkunjung ke negara anggota.

Hal ini menjadi hal yang difokuskan oleh ASEAN terutamanya dalam ATF itu sendiri. *ASEAN Tourism Forum (ATF)* merupakan forum yang dibentuk oleh ASEAN untuk berfokus mengelola mengenai pariwisata khususnya pada wisata di kawasan Asia Tenggara. Melalui pertemuan tahunan yang dilakukan oleh ATF yang menghasilkan Strategi yang disebut *ASEAN Tourism Strategic Plan (ATSP)*. Dan yang pertama dibentuk yaitu ATSP 2011-2015 yang memiliki tujuan untuk menarik wisatawan berkunjung melalui promosi produk, investasi dan hal lainnya. Namun pada ATSP 2016-2025 yang terbaru ini lah yang strategi dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan dibentuk, yang dibentuk untuk melihat negara-negara anggota untuk lebih peduli dan mengembangkan keberlanjutan bagi keberlangsungan bersama sesuai dengan visi dari ASEAN itu sendiri.

ATSP akan berkontribusi pada tujuan dari keseluruhan komunitas ASEAN melalui promosi pertumbuhan kawasan yang terintegrasi, daya saing di bidang pariwisata, dapat memfasilitasi perjalanan baik ke dalam maupun ke luar ASEAN. Dalam strategi kedua dari ATSP, ASEAN berupaya untuk meningkatkan keberlanjutan dan inklusif. Aktivitas tersebut ditempuh antara lain dengan rencana peduli lingkungan dan perubahan iklim, dengan cara terus memperhatikan hambatan dan peluang dalam penerapan dari perlindungan dan perubahan iklim, termasuk dengan bekerjasama dengan berbagai organisasi regional, internasional yang relevan dalam ASEAN. Sedangkan berkelanjutan dan inklusif di ASEAN perlu dijalankan secara konsisten dengan mengidentifikasi dan jelas menentukan

hambatan dan peluang dalam meningkatkan pariwisata ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif baik ke dalam maupun ke luar kawasan serta bekerjasama dengan badan-badan ASEAN yang relevan dalam memastikan pelaksanaan dari kegiatan prioritas NTO.

Salah satu fokus strategi prioritas dalam perlindungan lingkungan dan perubahan iklim ada tujuh diantaranya; perlindungan alam dan keanekaragaman hayati, lingkungan pesisir dan pantai, pengelolaan sumber daya air, perubahan iklim dalam *zero carbon*, bahan kimia dan sampah, pendidikan lingkungan hidup dan konsumsi dan produksi berkelanjutan. Strategi tersebut merupakan langkah untuk setiap negara melakukan atau menerapkan point tersebut di negara-negaranya, dalam rangka menjaga lingkungan kawasan bersama baik itu untuk kepentingan ekonomi, sosial maupun pariwisata yang berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam penerapannya ATSP mengalami kesulitan dan kendala dalam pengimplementasian dari ATSP, seperti pada ATSP sebelumnya ada faktor yang menjadi penghambat bagi penerapan ATSP di berbagai negara diantaranya dikarenakan perbedaan kondisi setiap negara, minimnya kesadaran masyarakat atau kurangnya pengetahuan dalam pengelolaan destinasi wisata, keamanan seperti dalam penerapan single visa dikarenakan dapat mempermudah bagi para pelaku kejahatan seperti terorisme dalam memasuki suatu negara, hingga permasalahan yang diakibatkan adanya perubahan iklim (bencana alam) yang tidak dapat diprediksi.

Dan dalam penerapan untuk mencegah permasalahan lingkungan dan perubahan iklim. Sehingga adanya perlindungan lingkungan dan perubahan iklim kelak akan menjaga lingkungan pariwisata agar dapat terjaga sehingga wisatawan

baik lokal maupun internasional dapat berkunjung ke ASEAN dengan senang. Namun, jika dilihat dari kekuatan sumberdaya yang berbeda, yang dimana tidak seluruh negara ASEAN siap untuk menerapkan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat lokal dan sektor publikasi-swasta dalam rantai nilai pariwisata, menjamin keselamatan dan keamanan, mengutamakan perlindungan dan pengelolaan situs warisan budaya dan meningkatkan daya tanggap terhadap perlindungan lingkungan dan perubahan iklim.

Namun dalam upaya pengimplementasiannya setiap negara memiliki hambatan dan tantangan dalam penerapannya, maka daripada itu perlunya setiap negara anggota membentuk upaya baik itu kebijakan hingga program dalam penerapannya serta koordinasi antara pemerintah dengan swasta bahkan keterlibatan dengan masyarakat. Di sisi lain, pariwisata berkelanjutan dan inklusif menjadi permasalahan yang riskan mengingat kurangnya jaringan masyarakat atau lembaga yang bisa mengelola hal tersebut untuk dapat menjangkau lebih luas ke seluruh negara ASEAN.

1.2. Perumusan Masalah

Melihat daripada latar belakang serta pembatasan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Mengapa ASEAN sulit mengimplementasi pariwisata berkelanjutan dan inklusif?”**

1.3. Pembatasan Masalah

Penulis lebih berfokus kepada bagaimana negara di ASEAN memperlakukan pariwisata berkelanjutan dan inklusif dalam upaya peningkatan daya tanggap

terhadap pariwisata ASEAN, yang ada dalam ASEAN Tourism Strategic Plan 2016-2025. Selain itu juga penulis menuliskan bagaimana sejarah dari pariwisata di Asia Tenggara, kemudian sejarah mengenai pembentukan ATSP pertama 2011-2016 hingga ATSP kedua 2016-2025. Penelitian ini berfokus pada tahun 2016-2022.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Menggambarkan kerjasama pariwisata ASEAN
2. Menggambarkan strategi pariwisata ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif
3. Menganalisis hambatan implementasi strategi pariwisata ASEAN yang berkelanjutan dan inklusif

1.4.2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi ilmu Hubungan Internasional, Universitas pasundan
2. Membantu melihat permasalahan dalam mengimplementasikan ATSP 2016-2025 dalam meningkatkan daya tanggap terhadap perlindungan lingkungan dan perubahan iklim
3. Untuk menambah wawasan para pembaca, khususnya bagi mahasiswa/I Ilmu Hubungan Internasional. Serta membantu peneliti lain dalam perumusan masalah atau kekurangan dari penelitian ini.